

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG**

Oleh:

Lailatur Rohmah*, Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari*****
Universitas Islam Malang
lailaturrohmah26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota malang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kota Malang, berjumlah 69 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang dipilih sebanyak 42 responden. Data diambil dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20 (Produk Statistik dan Solusi Layanan versi 14). Data uji yang digunakan adalah uji hipotesis simultan (f), koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji parsial tiga variabel memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (sig = 0,002), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (sig = 0,031) dan sistem pengendalian internal (sig = 0,000) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding government accounting standards, the utilization of regional financial accounting information systems and internal control systems on the quality of financial reports in Malang city government. The population in this study were employees of the Accounting and Administration Division of Regional Assets in BPKAD Malang, totaling 69 people. The technique used in sampling is purposive sampling technique. The sample chosen was 42 respondents. Data was collected using a questionnaire method. The data analysis method used is multiple regression analysis with the help of SPSS software version 20 (Product Statistics and Service Solutions version 14). The test data used is the simultaneous hypothesis test (f), the coefficient of determination (R^2), and the partial hypothesis test (t). The results showed that simultaneous independent variables significantly influence the dependent variable. Based on the results of the partial test three variables have an influence on the quality of financial statements, Understanding of Government Accounting Standards (sig = 0.002), Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems (sig = 0.031) and internal control systems (sig = 0,000) affect the quality of financial statements.

Keywords: *Understanding of Government Accounting Standards, Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems, Internal Control Systems and Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah proses untuk mengerti betul tentang SAP yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga memberi laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan relevan. SAP adalah prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian sesuai standar akuntansi pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal itu agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Udiyanti et al, 2014). Dengan demikian, maka diharapkan bentuk dan isi laporan keuangan daerah disusun dan disajikan secara andal dan relevan sesuai standar akuntansi pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan daerah yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus akuntabel, serta bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Selain pemahaman terhadap SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem mulai dari tahap pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Saat ini BPKAD telah banyak memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas (Ahmad, 2008).

Proses penyusunan laporan keuangan menjadi proses terpenting dari organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini berarti laporan keuangan suatu pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan cara mempertimbangkan terhadap kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2014 dalam Indriasih, 2014). Setelah itu, laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur dinyatakan bahwa Kota Malang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016-2018. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, sebab Pemko Malang selama 3 tahun berturut-turut berhasil memperoleh predikat opini WTP sejak tahun 2016. Kesuksesan

mempertahankan opini WTP ini merupakan hadiah prestasi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas LKPD tahun 2018 ini masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan namun permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Harapan BPK atas LKPD yang telah diperiksa oleh BPK dapat disajikan dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran.

Hasil riset terdahulu oleh Yuliani (2010) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, hasil riset Fikri (2011) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas Laporan keuangan yaitu menurut Afiah dan Dien (2014), pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Yensi, dkk (2014), bahwa sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang ada dan mengacu pada riset terdahulu maka penulis melakukan penelitian, yang berjudul: Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Wulandari dan Muhammad, 2014). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Udiyanti, et al (2014), dimensi pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, meliputi pemahaman terhadap: (1) neraca, (2) penyajian laporan realisasi anggaran, (3) penyajian laporan arus kas, (4) penyajian CALK, (5) penilaian persediaan, (6) pengakuan investasi, (7) pengakuan aset tetap, (8) perlakuan akuntansi konstruksi, (9) perlakuan akuntansi kewajiban, (10) perlakuan akuntansi koreksi kesalahan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, serta memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam rangka mendukung pembuatan suatu keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon, 2000). Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Wulandari dan Muhammad, 2014). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Meuthia, 2008 dalam Gusforni, 2011):

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna.
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Menurut Afiah (2008), dimensi tentang pemanfaatan teknologi informasi meliputi (1) tingkat kecepatan, (2) tingkat keamanan, dan (3) tingkat kualitas hasil.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten atau Kota. Menurut *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013), dimensi untuk mengukur sistem pengendalian internal, meliputi (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP Nomor 71 tahun 2010). Dimensi untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif yang bersifat asosiatif, di mana penelitian asosiatif bertujuan mengetahui hubungan kausal dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2008) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan dalam hal ini hubungan tersebut bersifat kausal dimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Populasi penelitian ini adalah pegawai Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kota Malang, berjumlah 69 orang. Teknik *sampling* pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* sebanyak 42 responden, dengan kriteria (1) pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi di BPKAD Kota Malang, (2) memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner ini disusun menggunakan skala *Likert* untuk mengukur pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang berdasarkan sikap, pendapat, dan persepsi responden.

Metode analisis data penelitian ini meliputi (1) uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data, (2) uji normalitas, serta (3) uji asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas). Sementara itu, teknik analisis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis simultan (uji *F*) dan hipotesis parsial (uji *t*) pada taraf signifikansi 0,05, yang seluruh proses pengolahannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) pada taraf signifikansi 0,05. Hasilnya menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah > 0,05, sehingga data masing-masing variabel dalam penelitian ini seluruhnya berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF dari *output* SPSS. Dalam penelitian ini, nilai *Tolerance* seluruh variabel independen $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sementara itu, untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini maka peneliti menggunakan metode uji *Glejser* dengan batasan *sig* 0,05 melalui SPSS. Dari hasil uji *Glejser* diketahui nilai *sig.* seluruh variabel independen $> 0,05$ sehingga data pada model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji *F* (*Anova*) diketahui nilai *Sig F* sebesar 0,000. Oleh karena nilai *Sig F* lebih kecil daripada nilai *Sig* yang ditentukan ($0,000 < 0,05$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Hal itu dikarenakan tingginya nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal, ditunjukkan adanya lingkungan pengendalian yang baik (sikap pimpinan dan pegawai sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengendalikan internal organisasi), penilaian terhadap risiko berjalan dengan baik dengan adanya aktivitas identifikasi dan evaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan untuk meminimalkannya, prosedur pengendalian dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan, memadainya informasi dan komunikasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan yang diperlukan oleh manajemen untuk menyusun pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi, serta pemantauan yang telah dilakukan dengan baik untuk memonitor/ menemukan kekurangan dan meningkatkan efektivitas dari pengendalian, baik dengan cara penilaian khusus sejalan dengan usaha organisasi maupun dengan mengamati perilaku pegawai atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Dengan demikian, setiap adanya kenaikan dari sistem pengendalian internal akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Dian (2014), tingginya koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal juga dapat menutupi rendahnya nilai koefisien regresi variabel independen lainnya (variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah dan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah), sehingga walaupun nilai koefisien regresi variabel-variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah) tidak terlalu tinggi, tetapi dapat ditutupi oleh tingginya nilai koefisien regresi variabel independen sistem pengendalian internal dalam rangka mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,532, yang menunjukkan besarnya pengaruh seluruh variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang sebesar 53,2%. Sedangkan 46,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini, seperti menurut Mahaputra dan Wayan (2014) yaitu kapasitas SDM, peran lembaga audit, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi staf akuntansi.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t , diketahui nilai t variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah sebesar 3,420 dengan nilai $Sig.$ 0,002. Oleh karena nilai signifikansi hitung t variabel ini lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan ($0,002 < 0,05$), maka H_{1a} diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemahaman standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Arah pengaruh yang positif itu dibuktikan dari koefisien variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah ($\beta_1 X_1$) sebesar 0,273, artinya jika pemahaman standar akuntansi pemerintah ditingkatkan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang akan meningkat sebesar 0,273. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang searah dan bernilai positif antara variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memahami standar akuntansi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil riset Yuliani (2010) yang menyimpulkan pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga konsisten mendukung hasil riset Dian (2014) menyimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil uji t , diketahui nilai t variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 1,634 dengan nilai $sig.$ 0,031. Oleh karena nilai signifikansi hitung t variabel ini lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan ($0,031 < 0,05$), maka H_{1b} diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Arah pengaruh yang positif tersebut dibuktikan dari koefisien variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ($\beta_2 X_2$) sebesar 0,238, artinya jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ditingkatkan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang akan meningkat sebesar 0,238. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang searah dan bernilai positif antara variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang.

Hal ini menunjukkan bahwa SKPD yang mampu menerapkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara cepat, terjamin keamanannya, hasilnya berkualitas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas pula. Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil penelitian Mahaputra dan Wayan (2014) yang menyimpulkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian juga konsisten mendukung hasil penelitian Sari, dkk. (2014) yang menyimpulkan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t , diketahui nilai t variabel sistem pengendalian internal sebesar 4,225 dengan nilai Sig 0,000. Oleh karena nilai signifikansi hitung t variabel ini lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan ($0,000 < 0,05$), maka H_{1c} diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal secara parsial

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Arah pengaruh yang positif itu dibuktikan dari koefisien variabel sistem pengendalian internal ($\beta_3 X_3$) sebesar 0,314, artinya jika sistem pengendalian internal ditingkatkan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang akan meningkat sebesar 0,314. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang searah dan bernilai positif antara variabel sistem pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang mampu diterapkan atau dijalankan dengan baik, yaitu dengan adanya keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipatuhinya perundang-undangan akan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah, sehingga hal tersebut dapat berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil penelitian Artana (2016) yang menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten mendukung hasil penelitian Febrian (2018) yang menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.
2. Pemahaman standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.
4. Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan populasi atau sampel dari beberapa instansi, misalnya meneliti instansi (BPKAD) di seluruh Pemerintah Kota/ Kabupaten di Jawa Timur atau dalam skala nasional sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini.
2. Perlu menambahkan variabel lain untuk memprediksi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya menambah variabel kapasitas SDM, peran lembaga audit, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi staf akuntansi sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur, dan Dien Noviany Rahmatika, 2014. *Factors Influencing the Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia)*. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 5. hal. 111-121.
- Ahmad, Yani. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Artana, Arlia Sari, 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Afiah, Nunuy, Nur. 2008. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission*. 2013. *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO. Mei 2013.
- Dian, Irma Diani. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pariaman. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Febrian Haty Ramadhan. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang. Skripsi. UNP.
- Indriasih, D. 2014. *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847.
- Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P. 2000. *Management information Systems Managing the Digital Firm*. 10th Edition. Pearson Education, Inc: Pearson.
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama, dan I Wayan Putra, 2014. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 8 Nomor 2 hal. 230-244.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana, 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Volume 2 No. 1.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Ari, et al. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 2 (1).
- Wulandari dan Muhammad. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Yensi, Desy Sefri, Amir Hasan, dan Yuneita Anisma, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). JOM FEKON. Vol. 1 No.1.
- Yuliani, Syafrida. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh).
Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.

*) Lailatur Rohmah adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Noor Shodiq Askandar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Arista Fauzi Kartika Sari adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.